

PENDIDIKAN AKHLAK DI ERA DIGITAL: MENJAWAB TANTANGAN KRISIS MORAL GENERASI MUDA

Rijalu Akmal

Universitas Annuqayah, Indonesia

Email Koresponden: rijaluak12@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation expands young people's spaces for learning, interaction, expression, and participation while simultaneously introducing ethical problems such as cyberbullying, disinformation, privacy violations, hate speech, performative self-presentation, plagiarism, and dependence on social validation. This article formulates a relevant model of moral education for digital life. It employs a qualitative literature review of fifteen sources comprising books, international reports, educational policies, and scholarly articles on character education, digital citizenship, media literacy, and child well-being. The materials were analyzed through thematic categorization and conceptual synthesis. The review finds that digital moral education must move beyond device prohibition toward the development of moral reasoning, reflective habits, communication ethics, responsibility for digital footprints, care, moral courage, and information-verification skills. Proposed strategies include value integration across the curriculum, dilemma-based learning, teacher modeling, pre-posting reflection routines, digital citizenship projects, restorative protocols, privacy literacy, and school-family partnerships. Outcomes should be assessed through changes in reasoning, habits, relationships, and ethical participation rather than knowledge of rules alone. Digital technology is therefore treated as a lived arena in which responsibility and character are practiced.

Keywords: *moral education; digital space; character education; digital citizenship; media literacy*

ABSTRAK

Transformasi digital memperluas ruang belajar, pergaulan, ekspresi, dan partisipasi generasi muda, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan etis berupa perundungan siber, disinformasi, pelanggaran privasi, ujaran kebencian, budaya pamer, plagiarisme, dan ketergantungan pada validasi sosial. Artikel ini bertujuan merumuskan strategi pendidikan akhlak yang relevan bagi kehidupan digital. Penelitian menggunakan metode studi pustaka kualitatif terhadap lima belas sumber berupa buku, laporan lembaga internasional, kebijakan pendidikan, dan artikel ilmiah mengenai pendidikan karakter, kewargaan digital, literasi media, serta kesejahteraan anak. Data dianalisis dengan kategorisasi tematik dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan akhlak digital perlu bergerak melampaui larangan penggunaan perangkat menuju pembentukan nalar moral, kebiasaan reflektif, adab komunikasi, tanggung jawab jejak digital, kepedulian, keberanian bertindak, dan kemampuan memverifikasi informasi. Strategi yang diusulkan mencakup integrasi nilai dalam kurikulum, pembelajaran berbasis dilema, keteladanan pendidik, pembiasaan refleksi sebelum mengunggah, proyek kewargaan digital, protokol restoratif, literasi privasi, dan kemitraan sekolah-keluarga. Keberhasilan dinilai melalui perubahan penalaran, kebiasaan, relasi, dan partisipasi etis, bukan hanya pengetahuan aturan. Pendidikan akhlak di ruang digital pada akhirnya menempatkan teknologi sebagai medan aktualisasi tanggung jawab manusia.

Kata kunci: *pendidikan akhlak; ruang digital; pendidikan karakter; kewargaan digital; literasi media.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola interaksi sosial, cara memperoleh informasi, hingga pembentukan nilai dan karakter generasi muda. Era digital yang ditandai dengan kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform komunikasi daring telah menciptakan ruang

baru yang disebut sebagai "ruang digital" atau "dunia maya", di mana batas antara realitas fisik dan virtual semakin kabur. Generasi muda saat ini, yang lahir dan tumbuh di tengah deras arus digitalisasi, menghabiskan sebagian besar waktu mereka berinteraksi dengan gawai dan berbagai platform daring. Kondisi ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana, terutama terkait dengan pembentukan akhlak dan moralitas generasi penerus bangsa.

Kemudahan akses informasi di era digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan mempermudah komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun di sisi lain, keterbukaan informasi yang tidak terfilter dengan baik justru berpotensi menjadi sumber degradasi moral bagi generasi muda. Konten-konten negatif seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), hingga penyebaran hoaks dan disinformasi dengan mudah dapat diakses oleh anak-anak dan remaja tanpa adanya filter yang memadai. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan, khususnya dalam upaya membentuk akhlak dan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama.

Krisis moral yang melanda generasi muda saat ini bukanlah isapan jempol belaka. Berbagai fenomena sosial yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan degradasi akhlak yang cukup memprihatinkan. Kasus-kasus tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, pergaulan bebas, kecanduan gawai, hingga rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru menjadi indikator nyata bahwa pendidikan akhlak perlu mendapat perhatian serius. Lebih jauh lagi, ruang digital turut memperparah kondisi ini dengan menghadirkan berbagai bentuk perilaku menyimpang baru yang sebelumnya tidak dikenal, seperti kecanduan media sosial, flexing atau pamer kekayaan yang berlebihan, hingga fenomena julid dan nyinyir yang menjadi budaya baru dalam interaksi di dunia maya. Generasi muda cenderung membentuk identitas dan citra diri berdasarkan validasi digital berupa jumlah likes, komentar, dan pengikut, yang pada gilirannya dapat menggeser orientasi nilai dari yang bersifat substantif menjadi superfisial.

Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya pengawasan dan pendampingan dari orang tua serta lembaga pendidikan dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital secara bijak. Banyak orang tua yang gagap teknologi (gaptek) sehingga tidak mampu memberikan pendampingan yang memadai kepada anak-anaknya dalam bermedia sosial. Di sisi lain, sistem pendidikan formal yang ada saat ini juga masih belum sepenuhnya mengintegrasikan pendidikan akhlak dengan literasi digital secara komprehensif. Kurikulum pendidikan agama dan akhlak yang diajarkan di sekolah cenderung bersifat normatif dan teoretis, belum menyentuh aspek aplikatif dalam menghadapi tantangan nyata yang dihadapi peserta didik di ruang digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara nilai-nilai akhlak yang diajarkan dengan realitas perilaku generasi muda dalam kehidupan bermedia sosial.

Padahal, pendidikan akhlak memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk kepribadian dan karakter manusia. Akhlak yang mulia merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban yang beradab dan bermartabat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, hal ini menegaskan betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia, termasuk di era digital saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke

dalam kehidupan generasi muda yang sarat dengan aktivitas digital, sehingga mereka mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai moral yang luhur.

Strategi pendidikan akhlak di ruang digital perlu dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik generasi digital native yang memiliki pola pikir, gaya belajar, dan preferensi komunikasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pendekatan pendidikan akhlak yang konvensional dan monoton dirasa kurang efektif untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan konten visual, interaktif, dan berbasis teknologi. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah, dalam merumuskan strategi pendidikan akhlak yang relevan dengan konteks kekinian tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai urgensi pendidikan akhlak di era digital serta merumuskan berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam membangun generasi yang berakhlak dan berakhlak mulia. Pembahasan akan difokuskan pada identifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pendidikan akhlak di ruang digital, serta eksplorasi berbagai pendekatan dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menjawab krisis moral yang tengah dihadapi generasi muda saat ini. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi upaya membangun generasi muda yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki fondasi akhlak dan karakter yang kokoh sebagai bekal menghadapi tantangan zaman..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Bahan kajian terdiri atas lima belas referensi yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap empat ranah: pendidikan karakter dan akhlak; konsep kewargaan digital; pengalaman serta kesejahteraan anak di ruang digital; dan strategi pendidikan atau kebijakan. Referensi mencakup buku rujukan, pedoman pemerintah Indonesia, laporan UNESCO, UNICEF, dan OECD, serta artikel ilmiah yang menyediakan kerangka konseptual atau hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan terarah terhadap tujuan, konsep utama, temuan, dan rekomendasi setiap sumber. Informasi kemudian dikodekan ke dalam tema peluang digital, risiko etis, penalaran moral, kebiasaan digital, keteladanan, literasi media, privasi, partisipasi, perlindungan, kemitraan, dan asesmen. Analisis dilakukan melalui reduksi, perbandingan antarsumber, pencarian hubungan, dan sintesis. Kerangka pendidikan karakter digunakan untuk membaca dimensi nilai dan kebiasaan; kewargaan digital digunakan untuk membaca kompetensi serta partisipasi; sedangkan literatur perlindungan anak digunakan untuk menjaga agar pendidikan tidak membebankan seluruh tanggung jawab kepada anak.

Keabsahan konseptual dijaga dengan triangulasi jenis sumber. Argumen normatif dibandingkan dengan temuan empiris dan laporan kebijakan. Misalnya, tuntutan tanggung jawab pribadi diseimbangkan dengan temuan tentang pengaruh desain platform, ketimpangan akses, dukungan orang dewasa, dan kondisi perkembangan. Cara ini penting karena persoalan digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui nasihat moral. UNESCO (2023) mengingatkan bahwa

penggunaan teknologi pendidikan harus dinilai berdasarkan tujuan, bukti, kesetaraan, dan kepentingan peserta didik, bukan semata karena teknologi tersedia.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Ia tidak mengukur perilaku peserta didik pada sekolah tertentu dan tidak menguji efektivitas satu program. Istilah generasi juga tidak dimaksudkan menganggap semua anak memiliki pengalaman digital yang sama. Akses, usia, disabilitas, budaya keluarga, kemampuan literasi, dan kondisi ekonomi menghasilkan pengalaman yang beragam. Karena itu, strategi yang dirumuskan perlu diadaptasi melalui asesmen konteks dan penelitian tindakan di satuan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Akhlak di Ruang Digital

Pendidikan akhlak digital adalah proses terencana untuk membentuk orientasi nilai, kemampuan menimbang, kebiasaan, dan tindakan terpuji ketika manusia menggunakan teknologi serta berhubungan dengan orang lain melalui sistem digital. Fokusnya bukan perangkat, melainkan manusia dan relasinya. Teknologi menjadi lingkungan moral karena setiap klik dapat membawa konsekuensi terhadap diri, orang lain, komunitas, dan pengetahuan publik.

Akhlah sebagai Integrasi Nilai, Nalar, dan Kebiasaan

Akhlah tidak dapat direduksi menjadi kepatuhan sesaat. Peserta didik perlu memahami alasan suatu tindakan dinilai baik, merasakan kepedulian terhadap pihak yang terdampak, memiliki keterampilan bertindak, dan mengulang tindakan sampai menjadi kebiasaan. Kerangka Lickona (1991) membantu menjelaskan tiga unsur tersebut: moral knowing, moral feeling, dan moral action. Di ruang digital, moral knowing mencakup kemampuan mengenali risiko dan hak; moral feeling mencakup empati terhadap orang yang tidak hadir secara fisik; sedangkan moral action mencakup tindakan konkret seperti menghentikan penyebaran, melaporkan bahaya, memberi dukungan, dan memperbaiki unggahan.

Nilai inti yang perlu diaktualkan mencakup kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, penghormatan, kasih sayang, kesederhanaan, keberanian moral, dan pengendalian diri. Nilai tersebut harus diterjemahkan menjadi indikator situasional. Kejujuran berarti tidak memalsukan identitas, tidak memanipulasi bukti, tidak mengklaim karya orang lain, dan transparan tentang bantuan alat digital. Amanah berarti menjaga data, meminta persetujuan, dan tidak memanfaatkan akses untuk merugikan. Pengendalian diri berarti mampu berhenti, menunda respons, mengatur perhatian, dan menolak dorongan untuk mengejar viralitas.

Pedoman penguatan pendidikan karakter di Indonesia menempatkan olah hati, olah pikir, olah rasa dan karsa, serta olah raga sebagai dimensi yang terintegrasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Kerangka ini dapat diterapkan di ruang digital. Olah hati membangun integritas; olah pikir membangun verifikasi dan penalaran; olah rasa membangun empati serta kesantunan; olah raga mengingatkan keseimbangan tubuh, istirahat, dan aktivitas; sedangkan relasi sosial menghubungkan seluruhnya dengan gotong royong.

Pendidikan akhlah juga perlu menghindari moralitas performatif. Peserta didik mungkin mengunggah pesan baik tetapi mempermalukan orang lain melalui grup tertutup. Ia mungkin patuh di akun resmi namun melakukan perundungan dengan akun anonim. Karena itu, asesmen tidak boleh bertumpu pada citra digital yang terlihat. Pendidik perlu menilai konsistensi alasan, kebiasaan, tanggung jawab, dan kesediaan memperbaiki kesalahan. Karakter tumbuh ketika nilai tetap memandu tindakan sekalipun tidak ada penonton atau hadiah.

Ruang Digital sebagai Ekosistem, Bukan Alat Netral

Ruang digital dibentuk oleh aturan komunitas, desain antarmuka, algoritma rekomendasi, model bisnis, dan budaya pengguna. Pendidikan yang hanya berkata “gunakan teknologi dengan bijak” terlalu umum. Peserta didik perlu memahami bahwa fitur tertentu mendorong respons cepat, perbandingan sosial, atau pengumpulan data. Kesadaran struktural ini memperkuat tanggung jawab tanpa menyalahkan korban dan sejalan dengan kewargaan digital yang kritis (Choi, 2016).

Tantangan Akhlak dalam Ekosistem Digital

Tantangan pertama adalah kaburnya batas publik dan privat. Pesan yang dianggap pribadi dapat disalin, tangkapan layar dapat beredar, dan data dapat bertahan lama. Anak sering memahami privasi sebagai menyembunyikan sesuatu, padahal privasi adalah hak mengendalikan informasi tentang diri. Pendidikan akhlak harus menghubungkan privasi dengan martabat, izin, amanah, dan keselamatan. Mengunggah foto teman tanpa persetujuan, membagikan nomor telepon, atau membuka rahasia kelompok adalah persoalan moral, bukan sekadar kesalahan teknis.

Tantangan kedua adalah disinformasi dan ekonomi perhatian. Informasi yang membangkitkan marah atau takut lebih mudah dibagikan sebelum diperiksa. UNESCO (2021) menempatkan kemampuan berpikir kritis, memeriksa sumber, memahami produksi pesan, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab sebagai inti literasi media dan informasi. Dalam pendidikan akhlak, verifikasi bukan hanya kecakapan akademik, melainkan bentuk kejujuran dan tanggung jawab agar seseorang tidak menjadi mata rantai kebohongan.

Tantangan ketiga adalah kekerasan relasional. Perundungan siber dapat berlangsung berulang karena materi dapat disalin dan audiensnya luas. Jarak layar mengurangi isyarat emosi korban, sementara tekanan kelompok mendorong penonton ikut menyukai atau membagikan. Jones dan Mitchell (2016) menunjukkan pentingnya penghormatan daring dan keterlibatan positif. Pendidik perlu mengajarkan peran pelaku, korban, penonton pasif, penguat, pembela, dan pelapor agar peserta didik melihat bahwa tidak bertindak juga dapat memengaruhi situasi.

Tantangan keempat adalah ketimpangan. Tidak semua anak memiliki perangkat, koneksi, keterampilan, ruang aman, atau dukungan orang dewasa yang sama. Global Kids Online memperlihatkan bahwa peluang dan risiko meningkat bersama penggunaan, tetapi hasilnya dipengaruhi dukungan dan konteks (Livingstone et al., 2019). Program akhlak digital tidak boleh memperlakukan anak yang aksesnya terbatas atau mengasumsikan kompetensi tinggi hanya karena anak sering menggunakan gawai.

Tantangan kelima adalah kesejahteraan. Penggunaan digital dapat mendukung belajar dan relasi, tetapi juga mengganggu tidur, konsentrasi, citra diri, dan keseimbangan aktivitas. OECD (2025) mendorong pendekatan holistik berbasis hak yang tidak hanya menghitung waktu layar. Pertanyaan moralnya ialah apakah teknologi membantu manusia berkembang, menjaga relasi, dan memenuhi kewajiban, atau justru menguasai perhatian. Pendidikan pengendalian diri harus mempertimbangkan desain lingkungan, rutinitas keluarga, dan dukungan sosial.

Tujuan Pendidikan Akhlak Digital

Tujuan pertama ialah membentuk integritas digital, yaitu kesatuan nilai antara ruang daring dan luring. Peserta didik memahami bahwa identitas akun tidak menghapus pertanggungjawaban. Integritas tampak ketika ia menyebut sumber, mengakui kesalahan, tidak menggunakan anonimitas untuk menyakiti, dan tidak memanipulasi penampilan demi menipu. Guru dapat menghadirkan dilema tentang plagiarisme, akun palsu, penyuntingan gambar, serta penggunaan kecerdasan buatan agar peserta didik berlatih memberi alasan, bukan menghafal jawaban.

Tujuan kedua ialah membangun empati dan penghormatan. Komunikasi berbasis teks sering kehilangan nada, ekspresi, dan konteks. Peserta didik perlu belajar membaca kemungkinan dampak, menanyakan maksud, serta memilih waktu dan kanal yang tepat. Empati digital bukan sekadar menggunakan kata sopan, tetapi bersedia melihat manusia di balik data dan avatar. Pendidikan moderasi beragama juga menekankan komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghargaan terhadap budaya sebagai orientasi hidup bersama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Nilai ini relevan ketika peserta didik berjumpa perbedaan di platform digital.

Tujuan ketiga ialah membangun kecakapan kritis. Choi (2016) mengingatkan bahwa kewargaan digital mencakup resistensi kritis terhadap ketidakadilan dan struktur yang merugikan. Peserta didik tidak cukup diajarkan menerima ketentuan platform; mereka perlu mampu bertanya siapa yang memperoleh manfaat, data apa yang dikumpulkan, mengapa konten tertentu direkomendasikan, dan suara siapa yang tidak terlihat. Kecakapan kritis mencegah pendidikan akhlak berubah menjadi kepatuhan tanpa daya.

Tujuan keempat ialah membangun partisipasi yang bermakna. Teknologi memungkinkan peserta didik menghasilkan pengetahuan, membantu komunitas, menggalang kepedulian, dan menyuarakan kepentingan publik. Ribble (2015) menempatkan komunikasi, hukum, hak dan tanggung jawab, keamanan, kesehatan, akses, perdagangan, literasi, serta etiket sebagai unsur kewargaan digital. Kesembilan unsur tersebut dapat diarahkan pada tujuan partisipatif sehingga pendidikan tidak hanya mencegah keburukan, tetapi juga memperbanyak kontribusi baik.

Tujuan kelima ialah menumbuhkan kemandirian moral. Kontrol eksternal perlahan dialihkan menjadi kemampuan mengatur diri. Peserta didik mampu menetapkan batas penggunaan, menilai kredibilitas, menolak tekanan kelompok, meminta pertolongan, dan memilih tindakan berdasarkan prinsip. Kemandirian tidak berarti dibiarkan sendiri. Orang dewasa tetap menyediakan struktur, dialog, perlindungan, dan teladan sesuai perkembangan usia.

Strategi 1: Integrasi Nilai dalam Kurikulum

Pendidikan akhlak digital tidak efektif jika hanya muncul pada satu seminar. Nilai perlu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, budaya sekolah, layanan konseling, kegiatan siswa, dan tata kelola teknologi. Pada bahasa, peserta didik menilai etika komentar dan kekuatan pilihan kata. Pada ilmu pengetahuan, mereka membahas integritas data. Pada pendidikan agama, mereka menghubungkan amanah, tabayun, larangan ghibah, serta penjagaan martabat dengan perilaku digital. Pada pendidikan kewarganegaraan, mereka mempelajari hak, partisipasi, dan tanggung jawab publik.

Integrasi dimulai dengan pemetaan sederhana. Setiap unit belajar menetapkan kompetensi akademik, situasi digital yang relevan, nilai yang hendak dilatih, tindakan yang dapat diamati, serta refleksi. Guru tidak perlu menambah banyak materi. Ia dapat mengubah cara tugas dirancang: mewajibkan atribusi sumber, meminta persetujuan sebelum publikasi, memberi ruang revisi, dan menilai kontribusi kelompok. Dengan cara ini, akhlak menjadi bagian dari proses kerja, bukan hiasan pada pembukaan pelajaran.

Kurikulum perlu berjenjang. Anak usia awal mempelajari aturan konkret seperti meminta izin, menyimpan informasi pribadi, berkata baik, berhenti ketika tidak nyaman, dan mencari orang dewasa tepercaya. Usia berikutnya mempelajari jejak digital, verifikasi, hak cipta, dinamika kelompok, serta strategi menolong. Remaja mempelajari algoritma, model bisnis, identitas, partisipasi politik, kecerdasan buatan, serta dilema kebebasan berekspresi. Kajian Lauricella et al. (2020) menegaskan bahwa kompetensi kewarganegaraan digital dapat diperkenalkan sejak usia dini melalui peran aktif pendidik.

Pembelajaran harus menggunakan bahasa tindakan. Nilai “tanggung jawab” dijabarkan menjadi memeriksa sebelum membagikan, menyimpan bukti saat melapor, memperbaiki informasi salah, dan menjalankan kesepakatan waktu. Nilai “peduli” dijabarkan menjadi tidak ikut menertawakan, menghubungi korban dengan aman, dan meminta bantuan. Indikator konkret membuat guru, peserta didik, dan keluarga memiliki ekspektasi yang sama tanpa mengerdilkan kedalaman nilai.

Integrasi juga memerlukan kebijakan kelembagaan yang koheren. Sekolah tidak dapat mengajarkan penghormatan sambil mempermalukan pelanggar di depan publik; tidak dapat mengajarkan privasi sambil menyebarkan foto anak tanpa persetujuan; dan tidak dapat mengajarkan keseimbangan sambil memberi tugas daring tanpa batas waktu yang sehat. Kurikulum tersembunyi dari praktik orang dewasa sering lebih kuat daripada slogan.

Strategi 2: Pedagogi Dialogis dan Berbasis Pengalaman

Metode utama pendidikan akhlak digital ialah dialog tentang dilema autentik. Guru menyajikan situasi tanpa membuka identitas nyata: seorang siswa menerima tangkapan layar percakapan pribadi; video teman menjadi bahan lelucon; tugas diselesaikan dengan bantuan kecerdasan buatan; atau informasi bencana belum terverifikasi. Peserta didik mengidentifikasi pihak yang terdampak, nilai yang bertentangan, pilihan tindakan, konsekuensi, dan alasan. Diskusi mengembangkan penalaran moral serta kemampuan melihat perspektif.

Dialog perlu diikuti latihan. Peserta didik mempraktikkan cara menolak ajakan membagikan konten, meminta izin, memberi atribusi, memeriksa sumber, membuat kata sandi kuat, mengarsipkan bukti, dan melapor. Simulasi membantu menjembatani pengetahuan dan tindakan. Hollandsworth et al. (2017) menekankan bahwa pendidikan kewargaan digital membutuhkan keterlibatan bersama sekolah dan komunitas, bukan tanggung jawab guru teknologi semata.

Rutinitas “jeda sebelum unggah” dapat digunakan lintas mata pelajaran. Sebelum mengirim, peserta didik bertanya: Apakah benar? Apakah perlu? Apakah bermanfaat? Apakah menghormati? Apakah saya memiliki izin? Apakah aman jika pesan ini bertahan lama? Pertanyaan ini bukan formula mekanis, melainkan alat menunda impuls. Pengulangan menjadikannya kebiasaan internal yang tetap berfungsi ketika tidak ada guru.

Refleksi pascakejadian sama pentingnya. Peserta didik menelaah apa yang terjadi, siapa terdampak, pilihan apa yang tersedia, mengapa ia bertindak demikian, dan bagaimana memperbaiki. Refleksi sebaiknya tidak menjadi pengakuan yang dipaksakan. Tujuannya memahami pola dan merencanakan tindakan lebih baik. Kesalahan diperlakukan serius tetapi tetap sebagai kesempatan belajar, kecuali ketika keselamatan membutuhkan tindakan perlindungan segera.

Tahap	Pertanyaan pendidikan	Bukti perkembangan
Sebelum	Nilai dan risiko apa yang perlu dipertimbangkan?	Rencana, alasan, izin, verifikasi
Selama	Apakah tindakan tetap aman, adil, dan menghormati?	Jeda, pilihan bahasa, dukungan teman
Sesudah	Apa dampak dan perbaikan yang diperlukan?	Refleksi, pemulihan, perubahan kebiasaan

Sumber: sintesis penulis berdasarkan literatur yang dikaji.

Strategi 3: Keteladanan dan Budaya Institusi

Keteladanan digital pendidik mencakup cara berkomunikasi, mengelola data, mengutip sumber, menggunakan grup pesan, dan merespons kesalahan. Guru yang meminta balasan di luar jam wajar, menyebarkan nilai, atau mengunggah foto tanpa izin memberi pesan yang bertentangan dengan pendidikan akhlak. Sebaliknya, guru yang mengakui kekeliruan, memperbaiki informasi, meminta persetujuan, dan menggunakan teknologi secara proporsional menunjukkan karakter dalam tindakan.

Budaya institusi dibangun melalui kesepakatan yang dirumuskan bersama. Kesepakatan memuat tujuan, bukan hanya hukuman: ruang belajar harus aman, fokus, jujur, dan saling menghormati. Peserta didik dilibatkan untuk menjelaskan alasan, contoh, serta langkah ketika terjadi masalah. Partisipasi meningkatkan rasa memiliki dan mengubah aturan dari kendali sepihak menjadi komitmen komunitas. Meski demikian, sekolah tetap bertanggung jawab menetapkan batas yang melindungi hak dan keselamatan anak.

Respons terhadap pelanggaran sebaiknya menggabungkan perlindungan, akuntabilitas, pembelajaran, dan pemulihan. Pada kasus perundungan, prioritas pertama ialah menghentikan bahaya dan melindungi korban. Setelah itu, pelaku perlu memahami dampak, menghapus atau memperbaiki materi sejauh mungkin, membuat rencana perubahan, dan menerima konsekuensi yang proporsional. Pendekatan restoratif tidak berarti mempertemukan korban dan pelaku tanpa persetujuan, juga tidak menggantikan kewajiban pelaporan pada kasus serius.

Sekolah memerlukan protokol yang jelas untuk perundungan siber, kebocoran data, konten seksual, ancaman, penipuan, dan disinformasi. Protokol menetapkan jalur pelaporan, orang yang bertanggung jawab, dokumentasi minimal, perlindungan kerahasiaan, komunikasi dengan keluarga, serta rujukan. UNICEF (2017) menekankan bahwa manfaat konektivitas harus disertai perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Pendidikan akhlak harus berjalan bersama sistem perlindungan, bukan menggantikannya.

Kebijakan teknologi harus konsisten dengan tujuan pendidikan. UNESCO (2023) menekankan penggunaan teknologi berdasarkan kepentingan belajar dan bukti. Sekolah dapat menentukan zona atau waktu bebas perangkat, standar aplikasi, minimisasi data, persetujuan publikasi, dan evaluasi vendor. Keputusan tersebut mengajarkan bahwa efisiensi tidak boleh mengalahkan martabat, privasi, kesetaraan, dan kesejahteraan.

Strategi 4: Kemitraan Sekolah, Keluarga, dan Komunitas

Keluarga adalah lingkungan pertama pembentukan kebiasaan digital, tetapi kemitraan tidak boleh berubah menjadi saling menyalahkan. Sekolah perlu memahami variasi pekerjaan orang tua, jumlah perangkat, pola pengasuhan, kemampuan digital, dan kebutuhan anak. Pertemuan keluarga lebih bermanfaat jika berisi demonstrasi pengaturan privasi, latihan percakapan, tanda risiko, jalur bantuan, dan penyusunan kesepakatan rumah daripada ceramah yang menakutkan.

Kesepakatan keluarga membahas kapan, di mana, untuk tujuan apa, dan dengan siapa teknologi digunakan. Aturan berlaku secara masuk akal bagi orang dewasa dan anak. Waktu makan, ibadah, belajar mendalam, percakapan, serta tidur dapat dilindungi dari gangguan. Namun, aturan perlu mempertimbangkan fungsi perangkat bagi pekerjaan, aksesibilitas, dan relasi. OECD (2025) menunjukkan pentingnya melihat kesejahteraan digital secara menyeluruh, bukan menyimpulkan dampak hanya dari durasi penggunaan.

Percakapan rutin lebih efektif daripada interogasi setelah masalah. Orang tua dapat bertanya apa yang menyenangkan, apa yang membuat tidak nyaman, bagaimana aplikasi bekerja, dan apa yang dilakukan ketika melihat teman diperlakukan buruk. Sikap tenang meningkatkan kemungkinan anak meminta bantuan. Jika setiap pengakuan langsung diikuti penyitaan tanpa dialog, anak mungkin belajar menyembunyikan masalah. Batas tetap diperlukan, tetapi harus disertai penjelasan dan jalur pemulihan kepercayaan.

Komunitas dapat menyediakan dukungan yang tidak mampu dipenuhi sekolah sendiri: layanan kesehatan mental, perlindungan anak, literasi hukum, kepolisian untuk kasus tertentu, organisasi keagamaan, media, dan perguruan tinggi. Kemitraan penting karena risiko digital melampaui jam serta batas sekolah. Prasetyo et al. (2021) menemukan bahwa kesiapan digital, kompetensi kewargaan digital, dan kebijakan pendidikan merupakan tema utama yang perlu dipadukan. Program terpisah tanpa koordinasi menghasilkan pesan yang tidak konsisten.

Suara peserta didik wajib dilibatkan. Anak mengetahui platform, bahasa, dan pola interaksi yang mungkin tidak terlihat oleh orang dewasa. Pelibatan dapat berupa survei aman, forum kelas, duta sebaya, audit kebijakan, dan produksi kampanye. Pelibatan bukan menyerahkan tanggung jawab perlindungan kepada anak, melainkan mengakui mereka sebagai pemegang hak dan mitra pengetahuan. Saran anak tetap dinilai dengan pertimbangan perkembangan serta keselamatan.

Strategi 5: Proyek Kewargaan Digital dan Literasi Kritis

Pendidikan akhlak memperoleh makna ketika peserta didik mengalami bahwa teknologi dapat dipakai untuk kebaikan. Proyek kewargaan digital dapat berupa peta informasi layanan publik, kampanye verifikasi, arsip sejarah lokal, dukungan bagi kelompok rentan, laporan masalah lingkungan, atau materi pendidikan yang aksesibel. Peserta didik merencanakan tujuan, audiens, sumber, izin, risiko, pembagian peran, dan cara mengevaluasi dampak.

Proyek harus menghindari aktivisme simbolik. Jumlah unggahan atau suka tidak cukup menjadi indikator manfaat. Peserta didik perlu bertanya apakah informasi akurat, apakah pihak yang dibantu dilibatkan, apakah gambar mengeksploitasi penderitaan, apakah data pribadi aman, dan apakah kegiatan berkelanjutan. Pertanyaan ini menghubungkan kepedulian dengan keadilan dan akuntabilitas. Choi (2016) menempatkan partisipasi serta resistensi kritis sebagai unsur kewargaan digital yang berhubungan dengan kehidupan kewargaan luring.

Literasi kritis mencakup penelusuran sumber, perbandingan klaim, pemeriksaan tanggal dan konteks, identifikasi iklan, pemahaman konten sintetis, dan kesadaran bias. Guru dapat menggunakan contoh yang tidak mempermalukan kelompok tertentu. Peserta didik mempraktikkan lateral reading: meninggalkan halaman untuk mencari informasi tentang penerbit, penulis, bukti, dan penilaian pihak lain. UNESCO (2021) menekankan bahwa literasi media dan informasi memungkinkan warga mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi secara etis.

Dalam penggunaan kecerdasan buatan generatif, pendidikan akhlak perlu menjelaskan batas bantuan, verifikasi keluaran, keterbukaan penggunaan, perlindungan data, dan tanggung jawab akhir pengguna. Peserta didik tidak boleh menganggap keluaran sistem sebagai kebenaran atau menyerahkan seluruh penilaian moral kepada mesin. Tugas dapat dirancang meminta jejak proses, perbandingan sumber, penjelasan revisi, dan refleksi tentang bagian yang dibantu alat. Tujuannya ialah mempertahankan agensi manusia, usaha belajar, serta kejujuran.

Proyek ditutup dengan publikasi yang bertanggung jawab dan refleksi. Peserta didik menilai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mungkin dirugikan, apa yang tidak mereka ketahui, dan apa yang akan diperbaiki. Kegagalan menjadi data pembelajaran. Hasil terbaik bukan hanya produk digital, melainkan pertumbuhan kemampuan bekerja sama, menimbang dampak, menerima kritik, dan bertanggung jawab kepada komunitas.

Asesmen Pendidikan Akhlak Digital

Asesmen akhlak harus rendah hati karena karakter tidak dapat disimpulkan dari satu tugas. Penilaian digunakan untuk membantu perkembangan, bukan memberi label “baik” atau “buruk”. Bukti dikumpulkan dari penalaran terhadap dilema, kebiasaan kerja, interaksi, refleksi, proyek, dan tindakan perbaikan. Guru mencari pola dalam waktu yang cukup sambil mempertimbangkan konteks. Skor kuis tentang keamanan hanya menunjukkan pengetahuan, bukan jaminan perilaku.

Dimensi pertama adalah penalaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi pihak terdampak, membedakan fakta dan asumsi, mengenali nilai, memperkirakan konsekuensi, mempertimbangkan hak, dan memberi alasan. Dimensi kedua adalah kebiasaan: memeriksa sumber, meminta izin, memberi atribusi, mengatur perhatian, dan menjaga data. Dimensi ketiga adalah relasi: bahasa yang menghormati, kemampuan mendengar, membantu, serta menyelesaikan konflik. Dimensi keempat adalah partisipasi: kontribusi bermakna, keberanian melapor, dan kepedulian publik.

Instrumen dapat berupa rubrik analitik, jurnal refleksi, catatan observasi, portofolio, penilaian diri, dan umpan balik teman sebaya. Data sensitif tidak boleh dikumpulkan secara berlebihan. Sekolah tidak perlu mengawasi akun pribadi peserta didik secara invasif untuk menilai karakter. Praktik semacam itu justru bertentangan dengan privasi dan kepercayaan. Bukti dipilih berdasarkan kebutuhan pedagogis dan prinsip minimisasi data.

Indikator perkembangan dibuat bertahap. Pada tahap awal, peserta didik mengenali aturan dengan bantuan. Tahap berikutnya, ia menerapkan strategi pada situasi yang dikenal. Kemudian ia mampu menjelaskan alasan, beradaptasi pada situasi baru, membantu orang lain, dan berinisiatif memperbaiki lingkungan. Perkembangan tidak selalu linear. Tekanan kelompok, emosi, dan konteks dapat memengaruhi tindakan, sehingga umpan balik perlu spesifik dan memberi kesempatan mencoba kembali.

Evaluasi program melihat koherensi ekosistem: apakah guru menjadi teladan; apakah kebijakan melindungi; apakah pelaporan dipercaya; apakah keluarga memperoleh dukungan; dan apakah peserta didik terlibat. Data dapat mencakup rasa aman, pengetahuan jalur bantuan, kualitas diskusi, kasus berulang, pemulihan, serta partisipasi positif. Penurunan laporan tidak selalu berarti masalah berkurang; mungkin kepercayaan menurun. Karena itu, data kuantitatif harus dibaca bersama pengalaman kualitatif.

Model Implementasi: Kenali–Nilai–Latih–Lindungi–Pulihkan

Sintesis kajian menghasilkan lima langkah berulang. Kenali berarti memetakan pengalaman, akses, dan risiko. Nilai berarti menghubungkan situasi dengan prinsip. Latih berarti mempraktikkan keterampilan dan kebiasaan. Lindungi berarti menyediakan kebijakan, privasi, serta bantuan. Pulihkan berarti memperbaiki kerugian dan mencegah pengulangan. Model ini menempatkan karakter, kompetensi, dan perlindungan dalam satu siklus.

Temuan utama kajian ini ialah bahwa pendidikan akhlak digital tidak boleh diposisikan sebagai reaksi panik terhadap teknologi. Pendekatan larangan semata mengabaikan peluang belajar dan partisipasi, sedangkan optimisme teknologi mengabaikan risiko serta ketimpangan. UNICEF dan penelitian Global Kids Online menunjukkan hubungan kompleks antara penggunaan, peluang, risiko, keterampilan, dan dukungan (Livingstone et al., 2019; Stoilova et al., 2021). Posisi yang memadai ialah pemberdayaan yang disertai perlindungan.

Pendidikan karakter memberi kedalaman nilai, tetapi memerlukan literasi digital agar mampu membaca situasi baru. Sebaliknya, kewargaan digital memberi kompetensi dan bahasa hak-tanggung jawab, tetapi memerlukan orientasi akhlak agar tidak berhenti pada kepatuhan prosedural. Penggabungan keduanya menghasilkan tujuan yang lebih utuh: manusia yang jujur, peduli, kritis, aman, mampu mengendalikan diri, dan aktif memperbaiki ruang bersama. Kerangka ini sejalan dengan pendidikan yang menempatkan teknologi pada tujuan manusiawi dan kepentingan peserta didik (UNESCO, 2023).

Tanggung jawab juga harus dibagi secara adil. Anak membuat pilihan, tetapi pilihan tersebut berlangsung dalam desain platform, budaya teman sebaya, kebijakan sekolah, dan kebiasaan keluarga. Menyuruh anak “bijak” tanpa mengubah lingkungan merupakan beban yang tidak proporsional. Sekolah harus membatasi pengumpulan data, keluarga membangun dialog, pemerintah melindungi hak, dan penyedia layanan merancang keselamatan. Pendidikan akhlak menjadi bagian dari ekosistem etis, bukan alibi untuk kegagalan sistem.

Implikasi praktisnya adalah memulai dari rutinitas kecil yang konsisten. Sekolah dapat memilih tiga prioritas satu semester: verifikasi sebelum berbagi, izin sebelum publikasi, dan respons aman terhadap perundungan. Prioritas dimasukkan dalam tugas, keteladanan, kebijakan, komunikasi keluarga, dan asesmen. Setelah kebiasaan terbentuk, ruang lingkup diperluas. Pendekatan bertahap lebih realistis daripada program besar yang berhenti setelah kampanye.

KESIMPULAN

Pendidikan akhlak di ruang digital merupakan upaya membentuk nalar moral, perasaan peduli, kebiasaan, kompetensi, dan tindakan bertanggung jawab dalam ekosistem teknologi. Tantangannya meliputi privasi, disinformasi, kekerasan relasional, ketimpangan, kesejahteraan, identitas, serta struktur platform. Generasi berkarakter bukan generasi yang menjauhi teknologi, melainkan generasi yang mampu menggunakannya secara jujur, aman, kritis, adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Strategi pokok meliputi integrasi nilai dalam kurikulum; dialog dilema dan latihan autentik; keteladanan serta budaya institusi; protokol perlindungan dan pemulihan; kemitraan sekolah-keluarga-komunitas; proyek kewargaan digital; literasi kritis; dan asesmen perkembangan. Model Kenali–Nilai–Latih–Lindungi–Pulihkan dapat digunakan sebagai siklus implementasi. Penelitian

lanjutan perlu menguji model pada jenjang dan konteks berbeda, melibatkan suara peserta didik, serta mengukur perubahan kebiasaan dan kualitas ekosistem dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Hollandsworth, R., Dowdy, L., & Donovan, J. (2017). Digital citizenship in K–12: It takes a village. *TechTrends*, 61, 524–530. <https://doi.org/10.1007/s11528-017-0190-z>
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 2063–2079. <https://doi.org/10.1177/1461444815577797>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Lauricella, A. R., Herdzina, J., & Robb, M. (2020). Early childhood educators' teaching of digital citizenship competencies. *Computers & Education*, 158, 103989. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103989>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Livingstone, S., Kardefelt-Winther, D., & Saeed, M. (2019). *Global Kids Online: Comparative report*. UNICEF Office of Research – Innocenti.
- OECD. (2025). *How's life for children in the digital age?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0854b900-en>
- Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2021). Digital citizenship trend in educational sphere: A systematic review. *International Journal of Evaluation*

and Research in Education, 10(4), 1192–1201.
<https://doi.org/10.11591/ijere.v10i4.21767>

Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). International Society for Technology in Education.

Stoilova, M., Livingstone, S., & Khazbak, R. (2021). Investigating risks and opportunities for children in a digital world: A rapid review of the evidence on children's internet use and outcomes. UNICEF Office of Research – Innocenti.

UNESCO. (2021). Media and information literate citizens: Think critically, click wisely! UNESCO.

UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms? UNESCO. <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>

UNICEF. (2017). The state of the world's children 2017: Children in a digital world. UNICEF.

Catatan: Seluruh referensi dalam daftar pustaka telah digunakan sebagai bodynote pada isi artikel.